

PENDIDIKAN AGAMA ISLAM INDONESIA PRA KEMERDEKAAN KEBIJAKAN POLITIK BELANDA DAN JEPANG TERHADAP PENDIDIKAN ISLAM

Lismayarti¹, Aidah Khairiyah^{2*}

¹ SDN 14 Simpang Ampek

^{2*} SD Sabbihisma 3

Email: lisma553@guru.sd.belajar.id, aidahkhairiyah19@gmail.com

Abstract

Perkembangan Pendidikan Islam di Indonesia sebelum kemerdekaan sangat dipengaruhi oleh kebijakan politik. Artikel ini akan membahas tentang Pendidikan Islam pada masa kebijakan politik kolonial Belanda dan Jepang di Nusantara. Pada masa penjajahan Belanda setidaknya ada dua kebijakan Belanda yaitu: Politik Etis, dan Ordonansi Guru/Sekolah Guru. Kebijakan Pada masa ini pendidikan Islam tidak mendapatkan perhatian dibandingkan dengan Sekolah Kolonial yang didirikan oleh pemerintah Belanda. Setelah terusirnya penjajah Belanda dari Nusantara pada Maret 1942 M, kekuasaan atas bangsa Indonesia beralih ke negara Jepang. Pada masa penjajahan Jepang di Nusantara dua jenis pengajaran ini (pengajaran kolonial dan pengajaran Bumi Putra) dihilangkan. Pada Kebijakan Jepang sistem pendidikan berorientasi kepada kepentingan perang

Keywords: Dutch Political Policy, Japan, Islamic Education

Abstrak

Perkembangan Pendidikan Islam di Indonesia sebelum kemerdekaan sangat dipengaruhi oleh kebijakan politik. Artikel ini akan membahas tentang Pendidikan Islam pada masa kebijakan politik kolonial Belanda dan Jepang di Nusantara. Pada masa penjajahan Belanda setidaknya ada dua kebijakan Belanda yaitu: Politik Etis, dan Ordonansi Guru/Sekolah Guru. Kebijakan Pada masa ini pendidikan Islam tidak mendapatkan perhatian dibandingkan dengan Sekolah Kolonial yang didirikan oleh pemerintah Belanda. Setelah terusirnya penjajah Belanda dari Nusantara pada Maret 1942 M, kekuasaan atas bangsa Indonesia beralih ke negara Jepang. Pada masa penjajahan Jepang di Nusantara dua jenis pengajaran ini (pengajaran kolonial dan pengajaran Bumi Putra) dihilangkan. Pada Kebijakan Jepang sistem pendidikan berorientasi kepada kepentingan perang.

Kata Kunci : Kebijakan Politik Belanda, Jepang, Pendidikan Islam

A. PENDAHULUAN

Dalam penyelenggaraan pendidikan Islam pada masa penjajahan Hindia Belanda dan Jepang, kebijakan politik merupakan bahan pertimbangan yang sangat signifikan dalam menentukan kebijakan. Sistem pendidikan, harus diselenggarakan sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai penjajah Kolonial Belanda dan Jepang dalam kedudukannya sebagai penguasa politik di wilayah jajahannya. Pada masa pra kemerdekaan baik pada masa penjajahan Belanda maupun penjajahan Jepang, pendidikan Islam dirundung duka yang mendalam akibat program pemerintahan Belanda yang berupaya mengembangkan sekolah missionaris dan kristenisasi. Kebijakan yang diterapkan Belanda dan Jepang tersebut menyebabkan pendidikan di Indonesia mengalami diskriminasi, seperti adanya pemberlakuan pendidikan sistem kasta, tidak diperbolehkannya penduduk pribumi mempelajari pendidikan Islam di negara sendiri, tidak diperbolehkannya penduduk Indonesia menempuh pendidikan sesuai pendidikan yang dialami bangsa penjajah serta diharuskannya penduduk pribumi mempelajari pendidikan umum untuk keperluan bangsa penjajah. Sehingga dengan perlakuan diskriminasi yang semakin kerap muncul istilah dualisme atau dikotomi pendidikan di Indonesia.

Pemberlakuan kebijakan tersebut tidak terlepas dari upaya pemenuhan kepentingan mereka sendiri sebagai bangsa penjajah.¹

B. PELAKSAAN DAN METODE

Jenis penelitian yang peneliti lakukan adalah penelitian kualitatif dalam bentuk penelitian Pustaka (*Library Research*) dan lapangan, Sumber data dalam penelitian ini adalah artikel-artikel dan Buku-buku yang terkait dengan eksistensi pendidikan islam di Nusantara.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Kebijakan Politik Belanda terhadap Pendidikan Islam

Penjajahan kolonial Belanda di Indonesia memberikan pengaruh besar pada pendidikan Islam di Indonesia. Imperiumisasi dan misionarisme adalah dua tujuan terbesar kolonial Belanda saat singgah di Indonesia. Dalam mengembangkan misi misionarisme, kolonial Belanda enggan memberikan ampun pada penduduk pribumi yang belajar agama baik di lembaga surau maupun di pesantren. Kolonial Belanda bahkan sering membunuh penduduk pribumi yang beragama Islam dan sedang belajar agama. Misi besar yang dilakukan kolonial Belanda dilakukan secara ketat, bahkan tidak segan mengeluarkan regulasi pembelajaran agama terutama pendidikan Islam bagi rakyat Indonesia.²

Pada masa kolonial, regulasi tentang pembelajaran agama terutama pendidikan Islam diatur secara ketat, misionarisme mereka untuk melancarkan paham sekuler dan agama kristen ke seluruh penjuru tanah air. Hal ini dapat dilihat dari upaya kebijakan Gubernur Djenderal Hindia Belanda Van Den Boss di Batavia pada tahun 1813, yang menetapkan sekolah Agama Kristen di setiap daerah Keresidenan. Usaha misionaris tersebut tetap dilanjutkan sampai tahun 1882 M, pemerintah kolonial Belanda membentuk suatu badan khusus yang bertugas mengawasi kehidupan beragama dan pendidikan Islam yang disebut Priesterraden.³ Selama tiga setengah abad Belanda menjajah wilayah Nusantara, berbagai macam kebijakan dan pendekatan telah dilakukan oleh Belanda dalam wilayah jajahannya, yang umumnya kebijakan mereka merugikan masyarakat secara umum. Menjelang dan awal abad XX ada beberapa kebijakan belanda di Indonesia yang secara signifikan berpengaruh terhadap pendidikan. Setidaknya ada dua kebijakan Belanda yaitu : (1) Politik Etis, dan (2) Ordonansi Guru/Sekolah Guru.⁴

a. Politik Etis

Politik Etis dapat diartikan dengan politik balas budi, sehingga adanya perubahan kebijakan politik Belanda terhadap Indonesia sebagai jajahannya. Selama ini politik yang diterapkan Belanda hanya menghisap dan mengeksploitir seluruh kekayaan Indonesia untuk kemakmuran Belanda. Akibat pengaruh ini kesengsaraan Indonesia terjadi dimana mana, maka mulai tahun 1901 Belanda menerapkan politik etis, sehingga Belanda mulai memperhatikan nasib jajahannya.⁵

Cikal bakal politik Etis berdasarkan pidato kenegaraan yang disampaikan oleh Ratu Belanda Wilhelmina menjelang akhir tahun 1901, diantara pokok-pokok pikirannya; de nieuwe koers de koloniale politiek (arah baru yang akan ditempuh oleh politik penjajahan).⁶

¹ Cahyanti, Eva Tri, "*Kebijakan Pendidikan Islam di Indonesia: Masa Kolonial Hingga Masa Reformasi.*" EDUKASIA: Jurnal Pendidikan dan Pembelajaran 2.2 (2021), h. 182-183

² *Ibid.*, h. 185

³ Raya, Moch Khafidz Fuad. "Sejarah Orientasi Pendidikan Islam di Indonesia (Dari Masa Kolonial Hingga Orde Baru)." *Jurnal Pendidikan Islam* 8.2 (2018), h. 231

⁴ Ramayulis, *Sejarah Pendidikan Islam : Perubahan Konsep, Filsafat dan Metodologi dan Era Nabi SAW sampai ulama Nusantara*, (Jakarta : Kalam Mulia, 2011), h. 282

⁵ *Ibid.*,

⁶ *Ibid.*,

Secara konsep politik Etis sangat baik karna adanya keberpihakan kepada kaum pribumi. Namun dalam pelaksanaannya kolonial belanda bekerja sama dengan kaum liberal (pemegang saham), tetap mengeksploitir daerah jajahannya untuk kepentingan ekonominya. Dalam menjalankan politik etis Belanda menerapkan *trilogy* program, yaitu meliputi : edukasi (pendidikan), irigasi (pengairan), dan transmigrasi (perpindahan penduduk dari daerah padat ke daerah perkebunan jawa). Disamping trilogi program tersebut, penjajah Belanda menerapkan prinsip asosiasi, asimilasi, dan unifikasi.⁷

Pada dasarnya ide Politik Etis itu, adalah bertujuan untuk mengangkat citra penjajah Belanda di mata pribumi, yaitu dengan cara memajukan dan meningkatkan kesejahteraan rakyat tetapi belum pernah dilaksanakan secara sungguh-sungguh.⁸ Karena itu pelaksanaan pelaksanaan politik Etis secara murni, sedikit banyaknya memerlukan pertimbangan-pertimbangan yang menyangkut kelanjutan politik kolonialis mereka. Diantara pertimbangan itu adalah :

- a. Memilih sistem pendidikan yang dapat yang dapat memenuhi tuntutan moral politik Etis, tetapi dapat mendukung kepentingan politik penjajahannya.
- b. Berusaha memenuhi dan bertanggung-jawab untuk mendidik dan mencerdaskan rakyat yang mayoritas muslim dan disamping itu berusaha meredam kekuatan yang mungkin timbul dari pengaruh fanatisme keagamaan mereka.⁹

Langkah-langkah yang dilakukan oleh Kolonial Belanda dalam menerapkan politik Etis, diantaranya :

- a. Memperbanyak jumlah sarana pendidikan, terutama sekolah desa.
- b. Melibatkan institusi pendidikan Islam agar dapat dimasukkan dalam sistem pendidikan umum.

Dalam pelaksanaannya, kedua usaha tersebut tidak pernah mencapai hasil sebagaimana yang direncanakan, langkah pertama terbentur masalah pembiayaan, sedangkan langkah kedua, juga terhalang karena menurut penilaian mereka, institusi pendidikan Islam yang ada ketika itu tidak memenuhi persyaratan dan berada di bawah standar ketentuan pemerintah.¹⁰

Suasana Pendidikan Islam pada zaman kolonial Belanda menggambarkan *dichotomi* (pemisahan) antara pendidikan agama dengan pendidikan umum. Tidak diketahui dengan pasti sejak kapan terjadinya *dichotomi* antara ilmu agama dengan ilmu umum dalam pendidikan Islam. Diperhatikan dari esensi ajaran Islam tidak ada ayat maupun hadist yang membedakan ilmu pengetahuan. Didalam Al-Qur'an diperintahkan kepada manusia untuk menyelidiki dan meneliti seluruh ciptaan-Nya sejak dari makhluk-Nya yang paling halus sampai planet-planet-Nya yang terbesar.¹¹

Di masa kolonial, wajah pendidikan di Indonesia diwakili oleh "Sekolah Kolonial" sebagai model sistem pendidikan kolonial dan "Pesantren" sebagai model pendidikan Islam. Dualitas pendidikan ini bertahan sampai kemerdekaan Indonesia ketika pendidikan dikelola oleh dua kementerian; yaitu Departemen Pendidikan sebagai payung "Sekolah Belanda"; dan pendidikan Islam berada di bawah naungan Departemen Agama sejak konsepsi pada 1946 hingga sekarang. Namun, Departemen Agama perannya hanya sebagai pengawasan untuk madrasah swasta awal sebagai kontrol pengelolaan pusat. Ada dua tingkatan madrasah yang diawasi mereka adalah Sekolah Rendah Islam atau Madrasah Tingkat Rendah (madrasah rendah) selama empat tahun dan Madrasah Lanjutan selama tiga tahun.¹²

⁷ *Ibid.*, h. 283

⁸ *Ibid.*,

⁹ *Ibid.*,

¹⁰ *Ibid.*, h. 284

¹¹ Fachri Syamsuddin. *Pembaharuan Islam di Minang Kabau Awal Abad XX*, (Jakarta: The Minang Kabau Foundation, 2005), h. 146

¹² Raya, Moch Khafidz Fuad, *Op.Cit.*, h. 233

Meskipun sekolah-sekolah yang didirikan pemerintah belum dapat mencukupi kebutuhan pendidikan untuk masyarakat, tapi sekolah-sekolah itu ikut membawa perubahan dalam bidang pendidikan di Indonesia. sekolah-sekolah sistem barat (Belanda) tersebut mendorong timbulnya pemikiran baru bagi pengelola pendidikan Islam di tanah air. Sistem pendidikan pondok pesantren mulai mendapat sorotan karena dinilai kolot, serta sudah tidak mampu memenuhi tuntunan dan kebutuhan zaman. Sebaliknya, para penyelenggara pondok pesantren merasa, bahwa sikap menutup diri terhadap dunia luar, erat kaitannya dengan usaha mempertahankan kemurnian agama dari unsur pengaruh budaya barat yang modern.¹³

Sebaliknya, adapula yang berpendirian, bahwa kaum muslimin harus berusaha menemukan sumber kekuatan barat dan memilikinya. Usaha ini dilakukan dengan cara mempelajari ilmu pengetahuan dan teknologi barat untuk memperkuat masyarakat Islam. kedua pendapat tersebut, menurut Edward Montimer merupakan kunci pemikiran pemuka-pemuka Islam ketika itu. Kalangan pembaru ini selanjutnya berpendapat, bahwa faktor yang menyebabkan keterbelakangannya umat Islam terletak pada kelemahan sistem pendidikan Islam yang ada. Untuk itu mereka mengadakan pembaruan dibidang pendidikan dengan menyelenggarakan sistem madrasah, sebagai hasil integrasi antara sistem pendidikan barat dengan sistem pesantren.¹⁴

Berdasarkan penjelesan di atas dapat disimpulkan bahwa politik Etis merupakan langkah Kolonial Belanda untuk mensejahterakan masyarakat pribumi, namun pada pelaksanaannya tidak satupun terlaksana dengan baik. Namun pada tujuannya hanya untuk mengangkat citra penjajah Belanda di mata pribumi, ini terbukti dari sekolah-sekolah kejuruan yang didirikan oleh pemerintah yang tamatannya disalurkan sebagai tenaga kerja diperusahaan atau perkebunan pemerintah dan swasta.

b. Ordonansi Guru/Sekolah Liar

Suatu Kebijakan pemerintah kolonial yang oleh umat Islam rasakan sangat menekan adalah Ordonansi Guru. Ordonansi guru pertama yang dikeluarkan pada tahun 1905 mewajibkan setiap guru agama Islam untuk meminta dan memperoleh izin terlebih dahulu, sebelum melaksanakan tugasnya sebagai guru agama. Sedangkan ordonansi kedua yang dikeluarkan pada tahun 1925, hanya mewajibkan guru agama untuk melaporkan diri. Kedua ordonansi ini dimaksudkan sebagai media pengontrol bagi pemerintah kolonial untuk mengawasi sepak terjang para pengajar dan penganjur Islam di negeri ini.¹⁵

Pada tahun 1926 ordonansi ini mendapatkan reaksi dari umat Islam, kongres al-Islam di Bogor menolak cara pengawasan terhadap pendidikan Islam. Hal ini juga dilakukan oleh Muhammadiyah dalam kongres XVII tahun 1928 menuntut agar ordonansi ini ditarik. Pada tahun 1934, Van Der Plas dari pihak belanda pun menolak ordonansi ini karena tidak ada gunanya dan dapat menjadi rintangan besar bagi karya produktif Belanda.¹⁶

Sehubungan dengan berdirinya madrasah dan sekolah agama yang dilaksanakan oleh kalangan Islam pembaruan, agaknya kekhawatiran pemerintah cukup beralasan. Semula memang pemerintah membiarkan kehidupan Islam pada batas-batas tertentu selama tidak mengganggu kehadiran belanda.¹⁷

Tetapi setelah melihat perkembangan lebih lanjut, seperti peningkatan jumlah madrasah dan sekolah-sekolah swasta sebagai institusi pendidikan diluar sistem

¹³ Hasnida, Hasnida. *"Sejarah Perkembangan Pendidikan Islam di Indonesia pada Masa PRA Kolonialisme dan Masa Kolonialisme (Belanda, Jepang, Sekutu)." Kordinat: Jurnal Komunikasi antar Perguruan Tinggi Agama Islam* 16.2 (2017), h. 250

¹⁴ *Ibid.*, h. 250-251

¹⁵ Us, Kasful Anwar, and Kompri Kompri. *"Kebijakan Pendidikan Islam di Indonesia (Dahulu, Kini dan Masa Depan)." (2017), h. 30*

¹⁶ Haidar Putra Daulay, *Sejarah Pertumbuhan dan Pembaharuan Pendidikan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2018), h. 37

¹⁷ Ramayulis, *Op.Cit.*, h. 286

persekolahan pemerintah kalangan pemerintah semakin hati-hati terhadap sikap netral mereka selama ini. Masalah Islam menjadi kekhawatiran pemerintah tersebut agaknya tidak terbatas pada adanya institusi pendidikan saja.¹⁸

Sejak tahun 1880 pemerintah kolonial secara resmi memberikan izin untuk mendidik pribumi. Kebebasan mendidik pribumi ini kemudian dihapuskan oleh adanya ordonansi pengawasan tahun 1923. Sejak itu setiap orang yang hendak mendirikan suatu lembaga pendidikan, harus memberitahukan maksudnya secara tertulis kepada kepala daerah setempat, dengan menyebutkan cara pengajaran dan tempat mengajarnya.¹⁹

Pengawasan melalui Ordonansi 1923 ini hanya bersifat wajib lapor bagi penyelenggara suatu lembaga pendidikan, sementara kalangan luas pejabat kolonial menghendaki pengawasan lebih ketat. Pada tanggal 17 Oktober 1929, Schrieke selaku direktur Pendidikan diperintahkan oleh Sekretaris Negara atas saran Dewan Penasehat Hindia, untuk meninjau kemungkinan ditindaknya sekolah liar. Tetapi Schrieke, yang pada dasarnya menyetujui pendapat pendahulunya Hardeman bahwa pemerintah belum perlu mengambil tindakan terhadap sekolah liar agaknya berhasil menunda masalah ini sampai tahun 1932; yakni keluarnya *Toeziicht-ordonantie particulier Ondernijfs* tanggal 17 September 1932 yang dinyatakan berlaku mulai 1 Oktober 1932.²⁰ Dinyatakan bahwa sekolah yang tidak dibangun oleh pemerintah, diharuskan minta izin terlebih dahulu, sebelum sekolah itu didirikan.²¹

Pada tahun tahun 1932 sering terjadi konferensi atau rapat umum yang berakhir dengan keputusan menolak Ordonansi Sekolah Liar. Konferensi dewan pendidikan Persatuan Muslimin Indonesia (Permi) di Sumatera Barat tanggal 26-27 Desember 1932 memutuskan bahwa ordonansi ini melanggar dasar-dasar Islam dan dasar-dasar umum, di samping mengurangi kebebasan bangsa Indonesia untuk mengatur dan membangun pendidikannya sendiri. Para ulama besar Minangkabau, yang beranggapan ordonansi ini merupakan percobaan untuk membunuh sekolah-sekolah Islam, menuduh pemerintah kolonial bertindak menguntungkan Kristen. Mereka memutuskan akan berjuang hidup atau mati untuk Islam, dan membentuk suatu panitia aksi yang diketuai oleh H. Rasul. Suatu partai yang dianggap loyal yaitu Budi Utomo, juga menentang keras ordonansi ini. Partai ini bertekad akan menarik anggota-anggotanya dari aneka lembaga perwakilan, andai kata pada tanggal 31 Maret 1933 Ordonansi Sekolah Liar belum ditarik kembali; bahkan akan menutup-menutup sekolahnya serta akan memberikan bantuan keuangan kepada parakurban perlawananan pasif. Sedangkan Muhammadiyah, pada mulanya menunjukkan sikap ragu terhadap ordonansi ini, mungkin karena sebagian sekolahnya memperoleh subsidi dari pemerintah, meskipun hanya sebagian kecil. Namun dalam konferensi daruratnya di Yogyakarta pada tanggal 18-19 Nopember 1932, akhirnya organisasi ini pun menolak Ordonansi Sekolah Liar.²²

Dari sini terlihat bahwa usaha pemerintah kolonial untuk menekan pendidikan swasta, ternyata memperoleh perlawanan keras dari pihak pribumi, baik dari organisasi nasional maupun organisasi Islam. Organisasi PSII dan Permi serta Muhammadiyah bahu membahu dengan Taman Siswa, Budi Utomo, PNI, Partindo, dan Isteri Sedar, untuk menentang keras Ordonansi Sekolah Liar. Reaksi ini memaksa pemerintah kolonial untuk meninjau ordonansi yang berumur setengah tahun itu. Pada pertengahan Februari 1933 ordonansi ini dinyatakanditarik kembali, dan pada pertengahan Oktober 1933 penarikan inidipertegasdengan keluarnya peraturan baru. Sejak itulah berbagai sekolah yang selama

¹⁸ *Ibid.*, h. 287

¹⁹ Us, Kasful Anwar, and Kompri Kompri, *Op.Cit.*, h. 34

²⁰ *Ibid.*, h. 35

²¹ Ramayulis, *Op.Cit.*, h. 288

²² Us, Kasful Anwar, and Kompri Kompri, *Op.Cit.*, h. 36

ini dinilai sebagai liar, disebut sebagai “sekolah swasta tak bersubsidi”. perkembangan selanjutnya jumlah sekolah ini semakin banyak dan mutunya pun semakin meningkat.²³

Berdasarkan penjelasan di atas dapat diketahui bahwa kebijakan Ordonansi Guru/Sekolah Liar merupakan kebijakan yang sangat merugikan pendidikan Islam di Indonesia. Terlihat dari guru-guru yang mengajar dan mendirikan sekolah harus mendapat izin terlebih dahulu dari pemerintahan Belanda. Ordonansi ini dilakukan oleh kolonial Belanda merupakan kekhawatiran terhadap kebangkitan pendidikan Islam dan umat Islam di Indonesia.

2. Kondisi Pendidikan Masa Penjajahan Jepang

Sistem pendidikan Belanda yang selama ini berkembang di Indonesia, semuanya diganti oleh bangsa Jepang sesuai dengan sistem pendidikan yang berorientasi kepada kepentingan perang. Tidak mengherankan bahwa segala komponen sistem pendidikannya ditujukan untuk kepentingan perang. Karakteristik sistem pendidikan Jepang adalah sebagai berikut :

a. Dihapusnya “Dualisme Pendidikan”

Pada masa Belanda terdapat dua jenis pengajaran, yaitu pengajaran kolonial dan pengajaran Bumi Putra, oleh Jepang sistem seperti ini dihilangkan. Hanya satu jenis sekolah rendah saja yang diadakan bagi semua lapisan masyarakat, yaitu: Sekolah Rakyat 6 Tahun, yang ketika itu populer dengan nama “Kokumin Gakko”. Sekolah-sekolah desa masih tetap ada dan namanya diganti menjadi Sekolah Pertama. Jenjang pengajaran pun menjadi:

- 1) Sekolah Rakyat 6 Tahun (termasuk sekolah pertama)
- 2) Sekolah Menengah Tinggi 3 Tahun
- 3) Sekolah Menengah Tinggi 3 Tahun (SMA-nya pada zaman Jepang)²⁴

b. Berubahnya Tujuan Pendidikan

Tujuan pendidikan di zaman penjajahan Jepang tidak banyak yang dapat diuraikan, karena murid hanya disibukkan dengan peperangan. Walaupun kebijakan yang diberlakukan terdapat aspek positif karena penyeragaman sekolah, tapi di sisi lain jumlah sekolah pada masa penjajahan Jepang menjadi lebih sedikit dibandingkan masa penjajahan Belanda. Begitu pula jumlah murid jenjang SD menurun 30% dan jumlah murid sekolah menengah menurun 90%. Tidak jauh beda dengan jumlah guru, ternyata juga merosot cukup banyak karena beratnya tugas sebagai guru.²⁵

Tujuan pendidikan adalah untuk menyediakan tenaga Cuma-Cuma (*romusha*) dan prajurit-prajurit untuk membantu peperangan bagi kepentingan Jepang. Oleh karena itu, murid-murid diharuskan latihan fisik, latihan kemiliteran dan indoktrinasi ketat. Pada akhir zaman Jepang terdapat tanda-tanda tujuan menjepangkan anak-anak Indonesia. Maka dikerahkanlah barisan propaganda Jepang yang terkenal dengan nama “Serdadu”, yang diberi tugas untuk menanamkan ideologi baru, ideologi itu harus menghancurkan ideologi Indonesia Raya.²⁶

c. Proses pembelajaran diganti kegiatan yang tak ada kaitannya dengan pendidikan

Proses pembelajaran di sekolah diganti dengan berbagai kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan di sekolah antara lain:

- a. Mengumpulkan batu, pasir untuk kepentingan perang
- b. Membersihkan bengkel-bengkel, asrama militer
- c. Menanam ubi-ubian, sayur-sayuran di perkarangan sekolah untuk persediaan makanan
- d. Menanam pohon jarak untuk pelumas

²³ *Ibid.*, h. 37

²⁴ Ramayulis, *Op.Cit.*, h. 288

²⁵ Cahyanti, Eva Tri, *Op.Cit.*, h. 189

²⁶ Ramayulis, *Op.Cit.*, h. 341

d. Pendidik dilatih agar mempunyai semangat perang

Seorang pendidik sebelum mengajar diwajibkan terlebih dahulu mengikuti didikan dan latihan (diklat) dalam rangka penanaman ideologi dan semangat perang, yang pelaksanaannya diklat ini dipusatkan di Jakarta selama tiga bulan. Para guru yang sudah mengikuti diklat diwajibkan meneruskan materi yang telah diterima itu kepada teman-temannya. Untuk menanamkan semangat Jepang tersebut, kepada murid-murid diajarkan bahasa Jepang, nyanyi-nyanyian semangat kemiliteran.

e. Pendidikan pada masa Jepang sangat memprihatinkan

Kondisi pendidikan bahkan lebih buruk dari pendidikan pada masa penjajahan Belanda. Sebagai gambarnya dapat dilihat dari segi kuantitatif trend mengalami kemunduran. Poesponegoro menguraikan tentang jumlah Sekolah Dasar dari 21.500 menurun menjadi 13.500 buah, sekolah lanjutan dari 850 buah menjadi 20, perguruan tinggi terdiri dari 4 buah sama sekali dapat melakukan kegiatannya. Jumlah Murid Sekolah Dasar Merosot 30% murid, Sekolah menengah menurun 90%. Guru dasar berkurang 35% guru sekolah menengah yang aktif hanya 5% saja.²⁷

f. Pemakaian bahasa Indonesia sebagai bahasa resmi

Pemakaian bahasa Indonesia, baik sebagai bahasa resmi maupun sebagai bahasa pengantar pada tiap-tiap jenis sekolah, telah dilaksanakan. Tetapi sekolah-sekolah itu dipergunakan juga sebagai alat untuk memperkenalkan budaya Jepang kepada rakyat.

Melalui trik Nipponisasi bahasa, bahasa-bahasa yang digunakan seperti bahasa Inggris, Amerika dan Belanda dilarang untuk dijadikan komunikasi baik lisan maupun tulisan. Bahasa Arab yang semula digunakan juga dilarang penggunaannya. Pelarangan tersebut juga dilakukan dalam kegiatan pendidikan di sekolah-sekolah. Pemerintah Nippon hanya mengizinkan penggunaan bahasa Indonesia sebagai bahasa pertama, dan bahasa Jepang sebagai bahasa kedua dalam komunikasi tak terkecuali dalam pendidikan. Pelarangan penggunaan bahasa-bahasa tersebut terutama terhadap bahasa Belanda yang bertujuan untuk menghilangkan pengaruh penjajah Belanda yang telah sekian lama menjajah Indonesia dari berbagai aspek.²⁸

3. Kebijakan Jepang dalam Pendidikan Islam

Semenjak Jepang datang, banyak sekolah dan madrasah ditutup. Bahkan di antara sekolah dan madrasah itu ditutup sendiri oleh para pendiri dan gurunya, karena takut dan untuk menghindari upacara Saekere (membungkukkan badan ke arak Tokyo) sebagai kewajiban untuk menghormati Kaisar Tenno Haika setiap pagi. Ritual ini tidak saja menyakitkan umat Islam, tapi juga dinilai sebagai bentuk kesyirikan Mereka yang menolak ritual tersebut akan dipukul, dihardik dan dicaci-maki.²⁹ Setelah sekolah dan madrasah ditutup, maka pola pendidikan Islam berubah dalam bentuk halaqah dengan guru yang berbeda-beda sesuai dengan mata pelajaran yang diajarkan di rumah-rumah para guru. Banyak di antara mereka yang ingin melanjutkan studi lanjut ke Mesir atau Mekah Arab Saudi, sesudah tamat dari mengaji satu kitab atau satu jenjang pendidikan, Namun, mereka takut keluar, karena khawatir ditangkap untuk dipaksa menjadi anggota Badan Pembantu Peperangan (BPP). Di badan ini, para pemuda jadi kuli pertahanan militer Jepang dan tidak diberi makan.³⁰

Proses pembelajaran model halaqah, ternyata tak berlangsung lama. Alasannya, seperti dijelaskan di muka, tentara Jepang salah strategi dan taktik dalam mengambil hati bangsa Indonesia. Maka, sesuai dengan Oendang-oendang Nomor 12 tertanggal 22 April 1942,

²⁷ *Ibid.*, h. 344

²⁸ Rohman, Miftahur, "Kebijakan Pendidikan Islam Masa Penjajahan Jepang " (2018), h. 20

²⁹ Saifudin, Saifudin, and Didin Saepuddin. "Pengaruh kolonialisme Jepang terhadap pendidikan Islam." *Ta'dibuna: Jurnal Pendidikan Islam* 9.2 (2020), h. 169

³⁰ *Ibid.*, h. 170

sekolah dan madrasah yang semula ditutup, secara berangsur-angsur dibuka kembali. Tepat pada 1 Juni 1942, Sekolah Rakyat yang pertama kali dibuka adalah HIS Djagamonjet, HIS Gastenweg, HIS Baloelweg, Jatinegara. Jumlah muridnya sebanyak 966 orang. Ini menunjukkan minat yang besar dari masyarakat Indonesia untuk belajar.³¹ Semenjak adanya Oendang-oendang Nomor 12 tertanggal 22 April 1942, Jepang tidak begitu ketat terhadap pendidikan Islam di Indonesia, Jepang memberikan toleransi yang banyak terhadap pendidikan Islam Indonesia, kesetaraan pendidikan penduduk pribumi, sama dengan anak penduduk atau penguasa, bahkan Jepang banyak mengajarkan ilmu-ilmu beladiri kepada pemuda Indonesia.³² Jepang mencari kekuatan dari bangsa Indonesia yang mayoritas beragama Islam untuk kepentingannya menghadapi perang Pasifik. Karena ambisinya untuk memenangkan perang Pasifik sangat besar, maka dengan strategi yang seolah-olah memihak umat Islam Indonesia, berbagai peraturan yang sebelumnya dilarang oleh pemerintah Belanda berangsur-angsur mulai diterapkan di nusantara. Kedatangan Jepang disambut terbuka bahkan dipermudah oleh kelompok-kelompok Islam yang anti-Belanda. Pemerintah Jepang memberikan izin pada sekolah-sekolah yang pernah berada di bawah pengasuhan Belanda. Bahkan lebih dari itu, Jepang juga mengizinkan rakyat Indonesia untuk membuka kembali sekolah yang dibawah asuhan swasta, termasuk di dalamnya sekolah-sekolah Islam.³³

Kebijakan yang diterapkan pemerintah Jepang tersebut berbeda jauh dengan kebijakan kolonial Belanda. Jika Belanda menerapkan misi kristenisasi maka Jepang mengabaikan hal tersebut karena misi utama Jepang adalah menipponkan bangsa dan umat Islam di Indonesia sebagaimana yang pernah dilakukannya pada Manchuria, Korea dan Formosa (Taiwan) sebelum Perang Dunia II.³⁴ Pada masa penjajahan Jepang banyak berdirinya lembaga-lembaga pendidikan dan pengajaran serta pendirian tempat-tempat ibadah lembaga-lembaga pendidikan dapat dikembangkan dan anak-anak dibolehkan untuk belajar agama dan mengaji.³⁵ Sikap penjajah Jepang terhadap pendidikan Islam ternyata lebih lunak, sehingga ruang gerak pendidikan Islam lebih bebas ketimbang pada zaman colonial belanda. Hal ini memberikan kesempatan bagi pendidikan Islam untuk berkembang.³⁶

Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa terdapat Perbedaan kebijakan pada masa penjajahan kolonial belanda dengan masa penjajahan Jepang terutama dalam bidang pendidikan Islam, pada awalnya Jepang sangat keras terhadap pendidikan, namun adanya keinginan untuk Jepang mencari kekuatan dari bangsa Indonesia yang mayoritas beragama Islam untuk kepentingannya menghadapi perang Pasifik, sehingga Jepang memberikan izin kepada sekolah-sekolah yang pernah berada di bawah pengasuhan Belanda, Bahkan lebih dari itu, Jepang juga mengizinkan rakyat Indonesia untuk membuka kembali sekolah yang dibawah asuhan swasta, termasuk di dalamnya sekolah-sekolah Islam. Pemberian izin ini memberikan dampak positif terhadap perkembangan pendidikan Islam, walaupun Strategi-strategi Jepang di atas adalah upaya Jepang untuk menarik simpati bangsa Indonesia agar mendapat dukungan secara penuh dalam menghadapi perang Pasifik atau perang dunia II.

4. Madrasah

Awal kedudukan Jepang, madrasah berkembang dengan cepat terutama dari segi kuantitas. Mumpung ada angin segar yang diberikan oleh Jepang, walaupun itu bersifat politis belaka, namun kesempatan itu tidak disia-siakan begitu saja dan umat Islam Indonesia memanfaatkan dengan sebaik-baiknya, hal ini terutama dilihat dari Sumatera yang terkenal dengan Madrasah Awaliyahnya yang diilhami oleh Majelis Islam Tinggi.

Hampir seluruh pelosok pedesaan terdapat Madrasah Awaliyah yang dikunjungi oleh

³¹ *Ibid.*,

³² Samsul Nizar, *Op.Cit.*, h. 314

³³ Cahyanti, Eva Tri, *Op.Cit.*, h. 188

³⁴ Rohman, Miftahur, *Op.Cit.*, h. 20

³⁵ Samsul Nizar, *Op.Cit.*, h. 314

³⁶ Ramayulis, *Op.Cit.*, h. 344

banyak anak laki-laki dan perempuan. Madrasah Awaliyah diadakan sore hari lebih kurang satu setengah jam lamanya, materi yang diajarkan ialah belajar membaca Al-Qur'an, ibadah, akhlak dan keimanan sebagai pelatihan pengajaran agama yang dilakukan di Sekolah Sakyat pagi hari.

a. Pendidikan Agama di sekolah

Sekolah Negeri diisi dengan pelajaran budi pekerti. Hal yang memberikan kesempatan bagi guru agama Islam untuk mengisi dengan ajaran agama, dan didalam pendidikan agama tersebut juga dimasukkan ajaran tentang jihad melawan penjajah.

b. Perguruan Tinggi Islam

Pemerintah Jepang mengizinkan berdirinya Sekolah Tinggi Islam di Jakarta yang dipimpin oleh KH. Wahid Hasyim, Kahar Muzakkir dan Bung Hatta. Walaupun Jepang berusaha mendekati umat Islam dengan memberikan kebebasan dalam beragama dan dalam mengembangkan pendidikan, namun para ulama tidak akan tunduk kepada pemerintahan Jepang, apabila mereka mengganggu akidah ummat. Hal ini dapat kita saksikan bagaimana masa Jepang ini perjuangan KH. Hasim Asy'ari beserta kalangan santri menentang kebijakan kufur Jepang yang memerintahkan setiap orang pada jam 07.00 untuk menghadap kearah Tokyo menghormati kaisar Jepang yang dianggap keturunan Dewa, Matahari. Akibatnya beliau ditangkap dan dipenjarakan oleh Jepang selama delapan Bulan.³⁷

Berdasarkan penjelasan di atas dapat diketahui bahwa kebijakan politik Jepang yang menggantikan kekuasaan Belanda di Nusantara memiliki sikap lebih lunak terhadap pendidikan Islam jika dibandingkan masa penjajahan Belanda. Longgarnya pengawasan terhadap pendidikan Islam memberikan dampak positif, sehingga bermunculan Madrasah-Madrasah Awaliyah di seluruh pelosok pedesaan. Selain bertambah pesatnya perkembangan pendidikan Islam di Indonesia, para pemuda bangsa juga telah terlatih dalam berbagai hal, sehingga semangat nasionalisme untuk mencapai kemerdekaan juga terlihat semakin kuat

D. PENUTUP

Selama tiga setengah abad Belanda menjajah wilayah Nusantara, berbagai macam kebijakan dan pendekatan telah dilakukan oleh Belanda dalam wilayah jajahannya, Setidaknya ada dua kebijakan Belanda yaitu Politik Etis dan Ordonansi Guru. Pada dasarnya ide Politik Etis itu, adalah bertujuan untuk mengangkat citra penjajah Belanda di mata pribumi, yaitu dengan cara memajukan dan meningkatkan kesejahteraan rakyat melalui pendidikan tetapi tidak pernah dilaksanakan secara sungguh-sungguh oleh pemerinthan Belanda. Sedangkan Ordonansi Guru adalah Suatu Kebijakan pemerintah kolonial Belanda untuk membatasi/pengawasan terhadap pendidikan Islam, karena mereka merasa khawatir terhadap perkembangannya sangat signifikan. Setelah Belanda angkat kaki dari bumi Indonesia, maka muncul pergerakan Jepang. Jepang tidak begitu ketat terhadap pendidikan Islam di Indonesia, Jepang memberikan toleransi yang banyak terhadap pendidikan Islam Indonesia, Kebijakan yang diterapkan pemerintah Jepang tersebut berbeda jauh dengan kebijakan kolonial Belanda. Jika Belanda menerapkan misi kristenisasi maka Jepang mengabaikan hal tersebut karena misi utama Jepang adalah menipponkan bangsa dan umat Islam di Indonesia sebagaimana yang pernah dilakukannya pada Manchuria, Korea dan Formosa (Taiwan) sebelum Perang Dunia II. Pada masa penjajahan jepang banyak berdirinya lembaga-lembaga pendidikan dan pengajaran serta pendirian tempat-tempat ibadah, Sikap penjajah Jepang terhadap pendidikan Islam ternyata lebih lunak, sehingga ruang gerak pendidikan Islam lebih bebas ketimbang pada zaman kolonial belanda diantaranya Madrasah, Pendidikan Agama di sekolah dan Perguruan Tinggi Islam.

³⁷ *Ibid.*, h. 345

E. DAFTAR PUSTAKA

- Cahyanti, Eva Tri. "Kebijakan Pendidikan Islam di Indonesia: Masa Kolonial Hingga Masa Reformasi." *EDUKASIA: Jurnal Pendidikan dan Pembelajaran* 2.2 (2021)
- Putra Daulay, Haidar, *Sejarah Pertumbuhan dan Pembaharuan Pendidikan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2018)
- Hasnida, Hasnida. "Sejarah Perkembangan Pendidikan Islam di Indonesia pada Masa PRA Kolonialisme dan Masa Kolonialisme (Belanda, Jepang, Sekutu)." *Kordinat: Jurnal Komunikasi antar Perguruan Tinggi Agama Islam* 16.2 (2017)
- Fachri Syamsuddin. *Pembaharuan Islam di Minang Kabau Awal Abad XX*, (Jakarta: The Minang Kabau Foundation, 2005)
- Maftuh. "Kebijakan Politik Pendidikan Hindia Belanda dan Implikasinya Bagi Pendidikan Islam (1900-1942)."
- Ramayulis, *Sejarah Pendidikan Islam : Perubahan Konsep, Filsafat, dan Metodologi Pendidikan Islam dari Era Nabi SAW Sampai Ulama Nusantara*, (Jakarta : Kalam Mulia, 2011)
- Saifudin, Saifudin, and Didin Saepuddin. "Pengaruh kolonialisme Jepang terhadap pendidikan Islam." *Ta'dibuna: Jurnal Pendidikan Islam* 9.2 (2020): 164-177.
- Samsul Nizar, *Sejarah Pendidikan Islam : Menelusuri Jejak Sejarah Era Rasulullah sampai Indonesia*, (Jakarta : Kencana, 2007)
- Raya, Moch Khafidz Fuad. "Sejarah Orientasi Pendidikan Islam di Indonesia (Dari Masa Kolonial Hingga Orde Baru)." *Jurnal Pendidikan Islam* 8.2 (2018)
- Us, Kasful Anwar, and Kompri Kompri. "Kebijakan Pendidikan Islam di Indonesia (Dahulu, Kini dan Masa Depan)." (2017)